

Judul : Didominasi SBSN, komisi VIII minta BPKH diversifikasi dana haji
Tanggal : Kamis, 02 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Didominasi SBSN Komisi VIII Minta BPKH Diversifikasi Dana Haji

ANGGOTA Komisi VIII DPR Sigit Purnomo mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan diversifikasi portofolio investasi, khususnya ekosistem haji dan umrah. Perluasan investasi itu mencakup sektor akomodasi, transportasi, katering, dan infrastruktur pendukung di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi.

Menurut Sigit, investasi BPKH saat ini masih didominasi oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan instrumen investasi lainnya seperti emas, sukuk korporasi, maupun reksadana syariah masih belum dimanfaatkan secara optimal.

"Kami mendorong BPKH agar bisa mempercepat diversifikasi investasi agar manfaat pengelolaan dana haji dapat dirasakan lebih luas oleh jemaah haji dan umrah Indonesia," ujar Sigit di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Sigit menjelaskan, langkah diversifikasi investasi sangat penting untuk memperkuat kemandirian ekosistem layanan haji dan umrah di masa mendatang. Dana haji BPKH seharusnya memberikan imbal hasil finansial dan mampu menciptakan manfaat langsung bagi jemaah.

Yang perlu diperkuat, lanjutnya, sektor layanan pendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. "Jadi penting untuk menerapkan filosofi "dari kita,

oleh kita, untuk kita" dalam pengelolaan dana haji," kata politisi PAN ini.

Senada, anggota Komisi VIII DPR Muhammad Husni mendukung langkah diversifikasi investasi yang tengah dilakukan BPKH. Karena dominasi investasi pada SBSN dinilai belum cukup untuk mencapai target nilai manfaat yang telah ditetapkan.

"Strategi diversifikasi investasi diperlukan agar target nilai manfaat sebesar 7,9 persen setiap tahun dapat tercapai secara berkelanjutan," kata Husni di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Husni menilai, instrumen investasi emas masih memiliki potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dia bilang, keuntungan dari emas itu pasti di atas 10 persen. Tapi ternyata saat ini realisasinya baru Rp 500 miliar. Jumlah itu masih jauh dari ketentuan undang-undang yang memungkinkan maksimal hingga 5 persen.

"Semua analis juga memprediksi akhir tahun ini angkanya (emas) di atas Rp 3 juta. Berarti mungkin ada keuntungan 50 persen," kata politisi Gerindra ini.

Selain itu, Husni mengapresiasi efisiensi biaya operasional BPKH yang saat ini berada di bawah 3 persen dari nilai manfaat. Namun, perlu ada perencanaan jangka panjang, terutama dalam menghadapi proyeksi peningkatan jumlah jemaah haji pada 2039. ■ TIF